

Analisis Kritis QRIS dan GPN dalam Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Digital Indonesia (Tinjauan Laporan USTR 2025)

¹Aditiya Agustiana, ²Tutut Mutiara Putri, ³Rizki Amallia Nurvianti, ⁴Laela Dwi Utami, ⁵Ira Soliha, ⁶Muhamad syahwildan

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi

E-mail: 1aditiyaagustiana@gmail.com, 2mutiaraputritutut@gmail.com, 3rizkiamal-lia2008@gmail.com, 4laeladwiutami07@gmail.com, 5irasoliha9@gmail.com, 6muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat infrastruktur ekonomi digital dan mempertahankan kedaulatan data nasional. Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari Amerika Serikat melalui Laporan National Trade Estimate (NTE) 2025, yang menyebut bahwa QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan asing, terutama Visa dan Mastercard, dalam sistem pembayaran domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan QRIS dalam penguatan ekonomi digital Indonesia, menelaah kritik AS terhadap kebijakan tersebut, serta mengevaluasi potensi ancaman terhadap kedaulatan data ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa walaupun QRIS dan GPN membantu meningkatkan inklusi finansial serta efisiensi dalam transaksi digital, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pada infrastruktur digital dan pengaruh geopolitik dari negara luar perlu diwaspadai agar tidak mengurangi kemandirian dan kedaulatan ekonomi suatu negara.

Kata kunci : *Ekonomi Digital ; GPN ; Kedaulatan Data ; QRIS ; USTR*

ABSTRACT

The implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) and the National Payment Gateway (GPN) is a strategic step by Indonesia to strengthen its digital economic infrastructure and protect national data sovereignty. However, this policy has come under scrutiny by the United States through the 2025 National Trade Estimate (NTE) Report, which claims that QRIS and GPN restrict the access of foreign companies, particularly Visa and Mastercard, in Indonesia's domestic payment systems. This study aims to analyze the utilization of QRIS in enhancing Indonesia's digital economy, review the criticisms from the U.S. government, and evaluate potential threats to national economic data sovereignty. The method employed is a literature study with a descriptive qualitative approach. The research findings indicate that although QRIS and GPN enhance financial inclusion and the efficiency of digital transactions, challenges such as limited infrastructure and geopolitical pressures must be anticipated to avoid undermining national economic independence and sovereignty.

Keyword : *Digital Economy ; Data Sovereignty ; GPN; QRIS ; USTR.*

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan ekonomi digital telah menjadi isu yang sangat penting dalam diskursus pembangunan nasional di era transformasi digital. Istilah ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengelola, mengatur, dan melindungi sistem ekonominya dalam ruang digital tanpa bergantung secara penuh kepada sistem, platform, atau regulasi dari negara lain. Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat kedaulatan ekonomi digital dilakukan antara lain melalui pembangunan sistem pembayaran nasional yang mencakup implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) (Hamzah Muchtar et al., 2024). Kedua inisiatif ini merupakan bagian dari *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* yang dicanangkan oleh Bank Indonesia guna mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal serta memiliki dimensi kedaulatan (Lubis et al., 2023)

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan antara keberhasilan formal implementasi QRIS dan GPN dengan realisasi pemerataan manfaat serta ketahanan sistem di tengah tekanan eksternal. Di satu sisi, QRIS telah mencatatkan kemajuan signifikan dari sisi jumlah pengguna dan merchant. Per Oktober 2024, jumlah pengguna QRIS di Indonesia mencapai lebih dari 54 juta, dengan persebaran merchant yang semakin luas (CNN Indonesia, 2024). Namun di sisi lain, sistem ini menuai kritik dari Pemerintah Amerika Serikat yang menilai bahwa Indonesia telah menciptakan hambatan teknis terhadap penyedia layanan keuangan asing, sebagaimana tercantum dalam laporan *National Trade Estimate Report* (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh USTR (Office of the United States Trade Representative, 2025).

Perspektif ini mencerminkan adanya ketegangan antara *agenda digital sovereignty* negara berkembang dan kepentingan liberalisasi pasar negara maju. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis yang mampu menjelaskan bagaimana QRIS dan GPN tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi transaksi tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional.

Solusi atas permasalahan ini tampak dalam upaya perumusan kebijakan integratif antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku usaha yang mendorong penggunaan QRIS dan GPN sebagai infrastruktur strategis nasional. Namun, solusi ini masih memiliki keterbatasan karena belum menyentuh dimensi geopolitik dan pemerataan akses digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi gap dalam literatur terkait pemahaman sistem pembayaran digital nasional sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi dan kedaulatan data (Astria, 2024).

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji adopsi QRIS dari perspektif perilaku pengguna dan pengaruhnya terhadap peningkatan efisiensi transaksi. Penelitian oleh Limanjaya (2014) dan Riskawati et al. (2023) menyoroti bahwa kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan kemudahan integrasi menjadi faktor pendorong utama adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM dan generasi muda (Mulyana et al., 2024). Sementara itu, Muchtar et al. (2022) menekankan bahwa literasi digital menjadi faktor krusial dalam menyukseskan adopsi teknologi pembayaran digital (Leonora & Pratikno, 2024).

Di sisi lain, sebagian besar kajian tersebut belum banyak membahas QRIS dan GPN dalam konteks kedaulatan digital dan tekanan eksternal. Beberapa literatur yang menyinggung dimensi ini antara lain adalah kajian oleh Saputri et al. (2023)

yang menyoroti aspek bandwagon effect dalam penggunaan QRIS, serta artikel oleh Lubis et al. (2021) yang membahas kesiapan teknologi pembayaran digital Indonesia di tengah disrupsi global (Tobing et al., 2021). Tetapi, literatur-literatur tersebut belum secara eksplisit mengaitkan sistem pembayaran digital Indonesia dengan kebijakan geopolitik, sistem pembayaran internasional, atau ancaman terhadap kontrol data ekonomi nasional.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merujuk pula pada pendekatan literatur dari perspektif hubungan internasional dan geopolitik digital, seperti yang dijelaskan dalam laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengenai risiko sistem pembayaran alternatif (Yuniarti & Herawati, 2020). Penelitian ini juga mengacu pada literatur kebijakan publik mengenai sistem pembayaran nasional dan tantangan proteksi data ekonomi yang muncul akibat masuknya agregator teknologi asing di pasar domestik (Rasdiyanti, 2022). Karya-karya terkini seperti laporan BI triwulan I 2025 dan laporan tahunan OJK 2023 menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan transaksi non-tunai, literasi keuangan, dan efisiensi biaya operasional lembaga keuangan (Silaban & Hakim, 2024). Namun, kedua laporan tersebut juga mencatat bahwa tantangan pemerataan akses dan proteksi data masih menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara lebih serius

Dalam perkembangannya, muncul pula studi tentang pelaksanaan QRIS di lingkungan UMKM di daerah-daerah seperti Tegal dan Bekasi yang menunjukkan bahwa efektivitas adopsi QRIS sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelatihan digital, penyuluhan dari Bank Indonesia, dan ketersediaan perangkat pendukung seperti jaringan internet yang stabil (Purnomo et al., 2024). Di sisi lain, pelaku UMKM di wilayah pedalaman masih mengalami

hambatan akses yang menyebabkan mereka tetap menggunakan transaksi tunai secara dominan (Jaman & Pertiwi, 2023).

Selain itu, ketergantungan pada sistem digital yang belum sepenuhnya domestik menjadi risiko tambahan dalam konteks kedaulatan ekonomi. Dalam beberapa kasus, transaksi yang dilakukan melalui aplikasi finansial atau dompet digital tetap terhubung ke sistem server yang dimiliki oleh perusahaan asing (Kusumastuti & Tinangon, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan aliran data dan informasi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kehadiran GPN menjadi sangat penting sebagai alternatif strategis yang dapat meminimalkan ketergantungan pada sistem *switching* internasional (Aji, 2023).

Penelitian dari Bank Indonesia juga menekankan bahwa QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga instrumen kebijakan makro yang dapat diintegrasikan dengan sistem penyaluran bantuan sosial, digitalisasi pajak, dan optimalisasi data fiskal (Gregori, 2021). Fungsi ini akan semakin maksimal apabila infrastruktur pendukung dan integrasi kebijakan di seluruh sektor dikuatkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri. Tantangan geopolitik dalam bentuk tekanan diplomatik dan isu ketidaktransparanan sistem pembayaran nasional menjadi sorotan dalam laporan USTR dan media internasional seperti CNN dan *Trade Finance Global* (Office of the United States Trade Representative, 2025b). Laporan-laporan ini secara eksplisit mempertanyakan alasan di balik langkah Indonesia yang mendorong adopsi QRIS sebagai sistem tunggal nasional dan menyebutnya sebagai bentuk hambatan teknis terhadap layanan keuangan asing

Literatur lain menunjukkan bahwa dominasi dolar AS dalam sistem pembayaran global menjadi faktor struktural yang mendorong negara-negara berkembang untuk mencari alternatif sistem pembayaran domestik (Saragih, 2024). Indonesia melalui QRIS dan GPN berupaya meniru pendekatan yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok dengan sistem UnionPay dan Rusia dengan MIR sebagai bentuk perlindungan terhadap tekanan global dan sanksi ekonomi.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan analisis kritis terhadap kebijakan QRIS dan GPN sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat kedaulatan ekonomi digital Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks geopolitik dan distribusi infrastruktur digital. Penelitian ini tidak hanya memetakan kondisi empiris dari hasil literatur, tetapi juga mengembangkan kerangka konseptual yang mengaitkan sistem pembayaran digital dengan agenda perlindungan data ekonomi, legitimasi kebijakan domestik, dan tekanan eksternal dari sektor global.

Implikasi dari penelitian ini bersifat konseptual dan praktis. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai kedaulatan ekonomi digital, sistem pembayaran domestik, dan kebijakan proteksi data. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan ekonomi digital yang seimbang antara keterbukaan dan kemandirian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif berbasis studi literatur untuk menganalisis secara kritis QRIS dan GPN dalam konteks kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam relasi antara kebijakan sistem pembayaran digital nasional dengan isu geopolitik global, literasi

keuangan domestik, serta pemerataan infrastruktur digital. Strategi penelitian ini menggabungkan teknik telaah dokumen, analisis isi, dan analisis tematik sebagai metode utama dalam merumuskan hasil temuan.

Objek yang diteliti adalah seluruh kebijakan, laporan resmi, serta hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan QRIS dan GPN di Indonesia dalam konteks penguatan kedaulatan ekonomi digital nasional. Karakteristik penelitian ini bersifat konseptual dan kontekstual, yang berarti tidak dibatasi oleh lokasi geografis tertentu tetapi dikaji berdasarkan sistem, regulasi, dampak sosial ekonomi, serta respon internasional.

Sumber data penelitian berasal dari 25 dokumen yang terdiri dari 20 artikel ilmiah dan 5 laporan kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga kredibel seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), USTR, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pemilihan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria: relevansi topik, validitas institusi penerbit, dan kontribusi terhadap pemahaman sistem pembayaran digital dan kedaulatan ekonomi (Hamzah Muchtar et al., 2024). Strategi pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “QRIS Indonesia”, “Gerbang Pembayaran Nasional”, “kedaulatan ekonomi digital”, “*digital sovereignty*”, “sistem pembayaran nasional”, dan “kritik USTR terhadap sistem pembayaran domestik” pada mesin pencari akademik seperti *Google Scholar*, DOAJ, dan direktori jurnal nasional Sinta. Artikel yang dipilih diterbitkan dalam rentang waktu 2019–2025 untuk memastikan keberkiniannya. Prosedur analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama yaitu yang pertama *Open coding*, yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang kedua *Axial coding*, yaitu pengelompokan informasi ke dalam subtema tertentu. Dan yang terakhir yaitu *Selective coding*, yaitu penyusunan narasi teoritis berdasarkan hasil interpretasi yang konsisten.

Untuk memperkuat transparansi dan validitas proses analisis tematik, digunakan table berikut:

Tabel 1. Struktur Tematik Kualitatif QRIS dan Kedaulatan Ekonomi Digital.

Kategori Tema Utama	Subtema Kritis	Fokus Pertanyaan Penelitian	Sumber Dukungan Literatur
Efisiensi Transaksi dan Inklusi Digital.	UMKM, Merchant, Pengguna Aktif.	Bagaimana QRIS meningkatkan efisiensi transaksi?.	(Lubis et al., 2023), (Riskawati et al., 2023), (Sholihah & Nurhapsari, 2023), (Latifah, 2024).
Kritik Eksternal terhadap QRIS dan GPN.	USTR, proteksionisme, digital barrier.	Apakah QRIS dianggap hambatan oleh aktor internasional?.	(Astria, 2024), (Mulyana et al., 2024), (Leonora & Pratikno, 2024), (Tobing et al., 2021).
Ketimpangan Akses Digital Nasional.	Wilayah 3T, infrastruktur, literasi digital.	Sejauh mana kesenjangan mempengaruhi efektivitas QRIS?.	(Yuniarti & Herawati, 2020), (Rasdiyanti, 2022), (Silaban & Hakim, 2024), (Purnomo et al., 2024).
Risiko Kedaulatan Data Ekonomi.	Aggregator asing, privasi, data cross-border.	Bagaimana QRIS dan GPN menjawab ancaman privasi data?.	(Jaman & Pertiwi, 2023), (Kusumastuti & Tinangon, 2019), (Aji, 2023), (Gregori, 2021).
Strategi Diplomasi dan Proteksi Domestik.	Regional payment system, ASEAN, dolarisasi ekonomi.	Apakah sistem ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia?.	(Raharjo, 2021), (Sarah, 2024), (Karina Raysa Maharani, 2023), (Mahika Ravi Shankar, 2024).

Analisis kualitatif tidak menggunakan uji statistik numerik melainkan interpretasi kontekstual terhadap makna dan isi dari teks. Validitas data diuji melalui triangulasi antar-sumber dengan membandingkan narasi dari jurnal akademik, laporan resmi lembaga nasional, dan pernyataan lembaga internasional. Teknik triangulasi ini penting untuk menghindari bias interpretasi serta membangun generalisasi temuan dalam kerangka akademik dan kebijakan publik (Office of the United States Trade Representative, 2025b). Penggunaan metode ini juga diperkuat dengan analisis kerangka regulasi domestik yang

melibatkan kebijakan OJK tentang keuangan digital, regulasi BI terkait sistem pembayaran, serta laporan sistem pembayaran global yang dikeluarkan oleh USTR dan IMF. Dengan begitu, penelitian ini mampu menggambarkan keterkaitan antara QRIS, GPN, dan ketahanan sistem ekonomi nasional terhadap tekanan global. Selama proses penelitian, tantangan yang dihadapi mencakup terbatasnya jumlah literatur yang secara eksplisit membahas QRIS dalam perspektif geopolitik dan *digital sovereignty*. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti menggabungkan studi lintas dari literatur kebijakan publik,

teknologi keuangan, dan hubungan internasional. Pendekatan ini bertujuan memperkuat dimensi multidisipliner dari kajian serta memperluas ruang interpretasi dalam menganalisis kebijakan sistem pembayaran nasional.

Metode kualitatif ini memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan kuantitatif dalam konteks penelitian kebijakan strategis. Jika pendekatan kuantitatif menekankan generalisasi statistik, maka pendekatan ini menekankan kedalaman pemahaman, kompleksitas realitas sosial, dan dinamika relasi antara aktor domestik dan internasional yang membentuk sistem ekonomi digital Indonesia. Dengan kata lain, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih dalam nilai-nilai strategis, dimensi kedaulatan, serta potensi ketimpangan dalam implementasi QRIS dan GPN (CNN Indonesia, 2024). Penelitian ini bertujuan menghasilkan kontribusi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. Temuan dari metode ini dapat

dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk: memperkuat arsitektur sistem pembayaran nasional yang inklusif dan berdaulat; menanggapi secara cerdas tekanan diplomatik dari luar negeri terkait proteksi sistem pembayaran domestik; dan menyusun strategi distribusi digital yang menjangkau wilayah tertinggal. Semua rekomendasi ini dibangun dari basis temuan yang konsisten dengan data literatur dan dokumen resmi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2024). Peneliti juga menyusun matriks analisis tematik lanjutan sebagai panduan dalam mengidentifikasi fokus interpretasi terhadap variabel tematik. Matriks ini digunakan dalam tahap coding untuk memetakan keterkaitan antar isu dan merumuskan pola naratif.

Tabel 2. Matriks Tematik Analisis Kualitatif QRIS dan GPN

Kode Tema	Indikator Isi	Interpretasi Naratif
T1	Akses merchant meningkat pesat di wilayah urban.	QRIS mendukung efisiensi ekonomi lokal.
T2	Wilayah pedalaman tidak terjangkau sinyal QRIS.	Ketimpangan digital memperlemah inklusi.
T3	Kritik proteksi dari USTR	QRIS dianggap sebagai ancaman keterbukaan sistem.
T4	Transaksi tetap direkam server luar negeri.	Ancaman terhadap kedaulatan data ekonomi.
T5	Integrasi GPN-QRIS belum optimal.	Kesempatan memperkuat interkoneksi domestic.
T6	Negara tetangga mengadopsi sistem interkoneksi QRIS.	Peluang diplomasi regional dan harmonisasi sistem.

Dengan seluruh kerangka metodologis ini, penelitian ini siap menjawab secara sistematis pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan dalam kerangka analisis kualitatif kebijakan strategis. Penekanan utamanya

adalah bagaimana sistem pembayaran digital domestik tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga perisai ekonomi nasional dari dominasi asing dan alat untuk memperkuat

posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global berbasis digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi QRIS dan GPN di Indonesia membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi digital nasional, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan perluasan inklusi keuangan. Melalui pendekatan analisis tematik yang diterapkan terhadap 25 sumber jurnal dan laporan resmi, ditemukan bahwa sistem pembayaran digital domestik yang terintegrasi memiliki potensi besar dalam memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Penelitian ini menguraikan secara sistematis temuan kualitatif yang diperoleh dari proses analisis dokumen dengan strategi coding tematik yang menghasilkan tiga fokus utama: efisiensi transaksi dan inklusi, tantangan ketimpangan infrastruktur dan kritik eksternal, serta peluang diplomasi ekonomi dan strategi kedaulatan digital nasional.

Dari hasil *open coding* terhadap data literatur, ditemukan bahwa QRIS telah mendorong percepatan adopsi pembayaran digital oleh pelaku UMKM, terutama di kawasan urban dan semi-urban. Kemudahan integrasi antar penyedia jasa, penyederhanaan QR dalam satu sistem nasional, serta kebijakan *zero MDR (Merchant Discount Rate)* untuk sektor mikro menjadi faktor pendukung utama keberhasilan ini (Hamzah Muchtar et al., 2024). Studi Riskawati et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan QRIS meningkat signifikan setelah dilakukan

sosialisasi oleh Bank Indonesia dan OJK, yang menekankan manfaat efisiensi dan keamanan transaksi digital (Lubis et al., 2023). Selain itu, laporan BI Triwulan I 2025 menegaskan adanya lonjakan volume transaksi digital pada *merchant* skala kecil dan menengah, yang sebelumnya kesulitan mengakses sistem pembayaran berbasis perbankan (Riskawati et al., 2023).

Namun, ketika dilakukan *axial coding* pada data terkait wilayah 3T, ditemukan bahwa efisiensi tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh pelaku usaha di kawasan pedalaman dan terpencil. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya literasi digital, dan kurangnya kehadiran mitra bank maupun agen keuangan *digital* (Sholihah & Nurhapsari, 2023). Studi di Kabupaten Tegal oleh BI menunjukkan bahwa akses QRIS di wilayah pedesaan hanya mencapai 23%, jauh lebih rendah dibandingkan daerah urban yang mencapai di atas 70% (Latifah, 2024). Laporan OJK tahun 2023 juga menyoroti rendahnya penetrasi pembayaran digital di provinsi dengan *indeks* literasi keuangan rendah seperti NTT, Maluku, dan Papua (Astria, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang memengaruhi validitas generalisasi manfaat QRIS sebagai alat inklusi keuangan universal.

Tabel 1. Perbandingan Distribusi Implementasi QRIS

Wilayah	Persentase Merchant Menggunakan QRIS	Kendala Utama
Urban	70% – 80%	Persaingan platform
Semi-Urban	50% – 60%	Literasi digital dan alat pembaca
Rural dan 3T	10% – 23%	Akses jaringan, literasi rendah, biaya alat

Selain itu, melalui proses *selective coding*, ditemukan bahwa QRIS dan GPN menjadi objek kritik dari pemerintah Amerika Serikat, sebagaimana termuat dalam laporan USTR 2025. Dalam laporan tersebut, sistem pembayaran nasional Indonesia dinilai menciptakan hambatan teknis (*technical barriers*) terhadap penyedia layanan keuangan asing. Kritik ini diarahkan pada kebijakan standarisasi QR yang dianggap memprioritaskan entitas domestik dan menghalangi kompetisi lintas negara

(Office of the United States Trade Representative, 2025b) Pandangan ini memunculkan kontroversi dalam ranah diplomasi ekonomi, karena Indonesia menekankan bahwa sistem QRIS dan GPN dibangun atas dasar kebutuhan internal untuk melindungi transaksi domestik dari dominasi sistem asing dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital (Leonora & Pratikno, 2024).

Tabel 2. Kritik dan Pembelaan Sistem QRIS di Forum Internasional

Sumber Kritik	Inti Kritik	Justifikasi Indonesia	Sumber Referensi
USTR 2025.	Hambatan teknis bagi sistem asing.	Sistem dibangun untuk efisiensi dan kedaulatan.	(Office of the United States Trade Representative, 2025b)
CNN Business.	Standarisasi QR mengurangi pilihan konsumen.	Proteksi konsumen dan penyederhanaan sistem.	(CNN Indonesia, 2024)
Trade Finance GL.	Potensi fragmentasi sistem pembayaran global.	QRIS terintegrasi dengan sistem regional ASEAN.	(Trade Finance Global, 2024)

Temuan lain yang signifikan adalah rendahnya integrasi antara QRIS dan GPN dalam praktik lapangan. Meskipun secara desain kedua sistem ini saling melengkapi, dalam kenyataan operasional masih terjadi segmentasi dalam penggunaan sistem *switching* oleh perbankan dan penyedia layanan keuangan non-bank. Laporan oleh Muchtar et al. (2022) menunjukkan bahwa kurangnya interkoneksi *real-time* antara GPN dan QRIS menyebabkan redundansi infrastruktur yang justru menghambat efisiensi (Silaban & Hakim, 2024). Penelitian ini mengungkap bahwa integrasi dua sistem ini akan menghasilkan sinergi besar dalam pengelolaan arus transaksi dan perlindungan data pengguna dari pihak ketiga.

pembayaran lintas negara menggunakan dompet *digital* berbasis QRIS yang sudah terdaftar di negara tujuan (Purnomo et al., 2024). Inisiatif ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki daya tarik sebagai infrastruktur regional yang dapat diperluas ke kawasan lain dan menjadi alat diplomasi ekonomi digital Indonesia di forum multilateral.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi persepsi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebagian pelaku usaha masih menganggap QRIS hanya sebagai alat transaksi biasa tanpa memahami nilai strategisnya dalam mendukung ekonomi nasional (Jaman & Pertiwi, 2023).

Dalam perspektif diplomasi digital, Indonesia melalui sistem QRIS telah menjalin kerja sama lintas batas dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sistem ini memungkinkan warga negara Indonesia melakukan

Selanjutnya, penelitian ini menelusuri lebih jauh dampak keberadaan QRIS dan GPN terhadap kemandirian data ekonomi nasional. Salah satu temuan penting adalah bahwa sebelum integrasi QRIS secara nasional, sebagian besar data transaksi digital

Indonesia masih berada dalam sistem server luar negeri, khususnya melalui platform pembayaran milik perusahaan asing. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap kebocoran data ekonomi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh entitas luar untuk kepentingan komersial atau geopolitik (Kusumastuti & Tinangon, 2019). Namun, dengan implementasi sistem *switching* domestik seperti GPN dan penggunaan QRIS yang terpusat di bawah pengawasan Bank Indonesia, proses pengumpulan dan analisis data menjadi lebih terkonsolidasi dan terkontrol di dalam negeri (Aji, 2023). Meski demikian, belum seluruh penyedia layanan keuangan digital terintegrasi penuh dalam sistem GPN. Beberapa *fintech* besar masih menjalankan sistem pemrosesan sendiri yang dalam beberapa kasus tidak sesuai standar interoperabilitas nasional. Hal ini memperlemah efektivitas QRIS sebagai alat kontrol data ekonomi, sehingga diperlukan regulasi lanjutan untuk mewajibkan semua penyedia layanan keuangan digital terhubung dengan sistem nasional (Gregori, 2021).

Interpretasi lain dari temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam masa transisi antara ketergantungan pada sistem global dan kemandirian digital nasional. Dibutuhkan waktu dan konsistensi regulasi agar seluruh ekosistem keuangan digital terintegrasi dan tidak meninggalkan celah untuk intervensi luar. Beberapa negara seperti Tiongkok dan India telah melakukan pendekatan serupa dalam menciptakan sistem pembayaran domestik yang komprehensif dengan tingkat penetrasi yang sangat tinggi, bahkan di wilayah pedesaan (Raharjo, 2021). Hal ini menjadi inspirasi sekaligus pembanding untuk memperkuat argumentasi Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional.

Penelitian ini juga mengkaji validitas eksternal dari penerapan QRIS dan GPN sebagai model sistem pembayaran untuk diterapkan di negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Studi perbandingan yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem QRIS

telah menjadi acuan regional dalam pembentukan interoperabilitas pembayaran digital lintas negara. Malaysia, Thailand, dan Singapura mulai mengadopsi sistem QR domestik yang kompatibel dengan standar QRIS untuk transaksi lintas batas (Saragih, 2024). Implikasi dari hal ini adalah meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi digital regional. QRIS bukan hanya berfungsi sebagai alat transaksi lokal, tetapi juga sebagai sarana penguatan integrasi ekonomi ASEAN dalam kerangka *Blueprint Digital Economy 2025*. Hal ini menjadikan QRIS dan GPN sebagai aset strategis nasional yang tidak hanya berfungsi dalam skala domestik tetapi juga sebagai sarana diplomasi teknologi yang bernilai tinggi (Karina Raysa Maharani, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang *digital sovereignty* dan proteksi ekonomi nasional dalam konteks sistem keuangan. Penelitian ini menambah pemahaman bahwa sistem pembayaran digital tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik dan keamanan data, terutama dalam ekosistem global yang didominasi oleh raksasa teknologi dan sistem keuangan dari negara maju. Secara praktis, temuan ini mendorong formulasi kebijakan yang lebih holistik dalam pengembangan teknologi keuangan, yaitu mencakup aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan geopolitik (Mahika Ravi Shankar, 2024).

Adapun batasan dari penelitian ini terletak pada ruang lingkungannya yang fokus pada studi literatur dan dokumen resmi, sehingga tidak mencakup observasi lapangan secara langsung. Oleh karena itu, interpretasi terhadap beberapa temuan sangat bergantung pada kredibilitas dan keluasan isi dari dokumen yang dianalisis. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menerapkan strategi triangulasi sumber dan validasi silang antar-jurnal dan laporan lembaga (*Office of the United States Trade Representative, 2025b*). Temuan penelitian ini memberikan pemahaman baru terhadap hubungan antara sistem

pembayaran nasional dan upaya memperkuat struktur kedaulatan ekonomi negara. QRIS dan GPN tidak hanya menjadi kebijakan teknologi finansial, melainkan juga menjadi perangkat diplomasi ekonomi, strategi proteksi data, dan alat distribusi manfaat ekonomi secara lebih inklusif. Penelitian ini mengajak pembuat kebijakan untuk tidak hanya melihat sistem pembayaran dari sisi efisiensi, tetapi juga dari perspektif kedaulatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global (CNN Indonesia, 2024).

Lebih lanjut, penguatan QRIS dan GPN juga memberikan implikasi signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional dalam konteks krisis global. Keberadaan sistem pembayaran yang berbasis domestik memungkinkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan asing, terutama dalam situasi ketika stabilitas keuangan internasional terganggu, sebagaimana pernah terjadi pada krisis global tahun 2008 maupun tekanan geopolitik akibat sanksi ekonomi lintas negara (Silaban & Hakim, 2024). Dalam konteks ini, QRIS dan GPN dapat berfungsi sebagai firewall digital yang menjaga kesinambungan transaksi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Selain itu, QRIS dan GPN telah mendorong lahirnya inovasi lokal dalam sektor teknologi keuangan. Dengan adanya standar nasional yang jelas dan terintegrasi, pelaku usaha teknologi keuangan (*fintech*) lokal memiliki pijakan regulatif untuk berkembang tanpa harus bersaing secara tidak seimbang dengan perusahaan teknologi global. Hal ini turut meningkatkan daya saing nasional dan menciptakan ruang kolaboratif antara regulator dan pelaku industri dalam membangun ekosistem keuangan digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Gregori, 2021). QRIS dan GPN juga memiliki nilai simbolik sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya kedaulatan digital dalam sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, sistem

pembayaran tidak hanya dipahami sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap arus data ekonomi, perilaku konsumen, dan penguatan identitas ekonomi nasional (Mahika Ravi Shankar, 2024).

Dengan QRIS sebagai salah satu model interoperabilitas lintas batas yang berhasil, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin regional dalam perumusan kebijakan sistem pembayaran digital. Inisiatif kerja sama antarnegara di Asia Tenggara semakin mengakui pentingnya sistem domestik yang dapat terhubung lintas negara tanpa kehilangan kendali atas data dan regulasi nasional masing-masing (Karina Raysa Maharani, 2023).

Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas integrasi QRIS dan GPN secara langsung melalui pendekatan partisipatif dan observasi lapangan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah dengan indeks literasi keuangan rendah. Penelitian lanjutan juga dapat memanfaatkan metode *mixed-method* untuk menggali persepsi pengguna serta dampaknya terhadap perilaku keuangan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sistem pembayaran nasional berbasis QRIS dan GPN tidak hanya layak dipertahankan, tetapi juga diperluas cakupannya sebagai bagian dari upaya nasional mewujudkan sistem keuangan yang berdaulat, aman, dan inklusif secara menyeluruh. Sistem ini akan menjadi pondasi strategis dalam menghadapi era ekonomi digital yang semakin kompetitif dan terintegrasi secara global (Bank Indonesia, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif menganalisis implementasi sistem pembayaran nasional berbasis QRIS dan GPN sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital

Indonesia. Melalui pendekatan analisis tematik kualitatif terhadap 25 sumber jurnal ilmiah dan laporan resmi, hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dan GPN tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun sistem keuangan nasional yang mandiri, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Hasil utama menunjukkan bahwa QRIS memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi di sektor UMKM dan ekonomi informal, khususnya di wilayah urban dan semi-urban. Standarisasi kode QR nasional serta interkoneksi antarpemenuja jasa pembayaran telah mendorong perluasan akses transaksi digital yang cepat, aman, dan terjangkau. Efisiensi ini menjadi faktor pendukung dalam membangun infrastruktur pembayaran yang kompetitif, sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi riil dan memperluas distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi ketimpangan spasial dalam implementasi QRIS dan GPN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan, serta akses terbatas terhadap perangkat transaksi nirsentuh. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pembayaran digital nasional telah berhasil di berbagai aspek, intervensi kebijakan afirmatif tetap diperlukan untuk menjamin pemerataan manfaat secara geografis.

Lebih lanjut, studi ini menganalisis dinamika eksternal terkait laporan USTR 2025 yang menilai kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia sebagai hambatan teknis perdagangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran domestik telah menjadi bagian dari perdebatan dalam konteks geopolitik dan diplomasi ekonomi global. Justifikasi Pemerintah Indonesia bahwa QRIS dan GPN merupakan

instrumen kedaulatan data dan inklusi keuangan domestik, menunjukkan adanya kesadaran strategis untuk mempertahankan kontrol atas infrastruktur ekonomi digital nasional.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan big data dari transaksi QRIS dan GPN dapat menjadi basis perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan responsif. Integrasi data tersebut berpotensi mendukung perencanaan fiskal, pemetaan tren ekonomi, hingga optimalisasi distribusi bantuan sosial secara real-time. Dengan demikian, QRIS dan GPN bukan hanya alat efisiensi pembayaran, melainkan juga katalis dalam pengembangan sistem ekonomi digital nasional yang berdaulat, adaptif terhadap tantangan global, dan selaras dengan kepentingan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>
- Astria, P. R. (2024). Evaluasi Penerapan Digitalisasi Ekonomi Berbasis QRIS, Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Banyuwangi Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(03), 768–774.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2025*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LKM-Tw-I-2025.pdf>
- CNN Indonesia. (2024). *Pengguna QRIS Naik Jadi 54 Juta per Oktober 2024*. CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. (2024, November 20). *Pengguna QRIS Naik Jadi 54 Juta per Oktober 2024*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241120174948-78-1168824/pengguna-qr-is-naik-jadi-54-juta-per-oktober-2024>

- Gregori, T. (2021). Protectionism and international trade: A long-run view. *International Economics*, 165, 1–13.
- Hamzah Muchtar, E., Trianto, B., Maulana, I., Alim, M. N., Marasabessy, R. H., Hidayat, W., Junaedi, E., & Masrizal. (2024). Quick response code Indonesia standard (QRIS) E-payment adoption: customers perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316044>
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan pajak negara Indonesia terhadap perusahaan multinasional digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Karina Raysa Maharani. (2023). *IMPLEMENTASI KERJASAMA CROSS BORDER QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) INDONESIA – THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL* [Skripsi sarjana hukum, universitas islam indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46580>
- Kusumastuti, A. D., & Tinangon, J. R. (2019). Penerapan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dalam menunjang transaksi daring. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1).
- Latifah, N. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605.
- Leonora, G., & Pratikno, R. V. (2024). REGULASI PERDAGANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DALAM EKSPANSI BISNIS DI UNI EROPA: STUDI KASUS ALIBABA. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 25–43.
- Lubis, R., Permesti, R. R. C. M., Leonardo, E., & Sari, E. N. (2023). The Influence of Financial Technology and E-commerce on the Success of MSMEs: Literature Review. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 1, 1058–1079.
- Mahika Ravi Shankar. (2024). *US Treasury official warns of alternative payment systems risk*. Trade Finance Global. <https://www.trade-financeglobal.com/posts/us-treasury-official-warns-of-alternative-payment-systems-risk>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Office of the United States Trade Representative. (2025a). *2024 REPORT TO CONGRESS ON CHINA'S WTO COMPLIANCE*. <https://doi.org/https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2025/january/ustr-releases-annual-report-chinas-wto-compliance>
- Office of the United States Trade Representative. (2025b, January). *USTR Releases Annual Report on China's WTO Compliance*. Office of the United States Trade Representative. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2025/january/ustr-releases-annual-report-chinas-wto-compliance>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). (2024, August 2). *OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. OJK.Go.Id. <https://ojk-go-id.translate.google/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-And-Statistics-Indonesia-Present-National-Survey-On-Financial-Literacy-And-Inclusion-2024-Findings.aspx>
- Purnomo, R. F., Alie, M. S., Oktaria, E. T., Sekarsari, M., & Rini, P. (2024). SOSIALISASI PENGELOLAAN UMKM DENGAN MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL DI DESA WISATA WAY TEBING CEPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 93–98.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–299.

- Rasdiyanti, A. D. (2022). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 13–24.
- Riskawati, R., Savitri, R. H., & Abd Wahab, N. (2023). Findings on the Evolution of Pre-and Post-Covid-19 Digital Payment Systems in Indonesia: Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN)*, 2(6), 1231–1244.
- Saragih, V. R. (2024). *Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (Padg) tentang Qris terhadap Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Indonesia Kota Medan)*.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–12.
- Silaban, J. R., & Hakim, L. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS)(Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung). *Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 394–402.
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Acta Comitas*, 6(03), 491. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p3>
- Trade Finance Global. (2024). *US Treasury official warns of alternative payment systems risk*. <https://www.trade-financeglobal.com/posts/us-treasury-of-ficial-warns-of-alternative-payment-systems-risk>
- Yuniarti, S., & Herawati, E. (2020). Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 154–166.